

**Rekonstruksi Hukum Tentang Ganti Rugi Sisa Pengadaan Tanah
Proyek Milik Pemerintah dalam Perspektif Hukum Islam dan
Hukum Nasional**

DISERTASI

Oleh :

MUHAMMAD RIZKI AZHARI

NIM. 210311020088



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA S-3 ILMU SYARI'AH
BANJARMASIN**

2026

**Rekonstruksi Hukum Tentang Ganti Rugi Sisa Pengadaan Tanah
Proyek Milik Pemerintah dalam Perspektif Hukum Islam dan
Hukum Nasional**

DISERTASI

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor
Ilmu Syariah

Oleh :

MUHAMMAD RIZKI AZHARI

NIM. 210311020088

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA S-3 ILMU SYARI'AH
BANJARMASIN**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizki Azhari
Nim : 210311020088
Tempat, Tanggal Lahir : Barabai, 06 Juli 1991
Program Studi : Ilmu Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi saya yang berjudul: **“Rekonstruksi Hukum Tentang Ganti Rugi Sisa Pengadaan Tanah Proyek Milik Pemerintah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional”** adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa disertasi ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 5 Januari 2026

Yang membuat pernyataan



Muhammad Rizki Azhari



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME
1445/Un.14/IV/UPM-BP/10/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com>, dengan ini, kami nyatakan bahwa disertasi yang ditulis oleh

Nama : Muhammad Rizki Azhari
NIM : 210311020088
Jenjang/Program Studi : S-3 Ilmu Syaria'ah (IS)
Judul : Rekonstruksi Hukum Tentang Ganti Rugi Sisa Pengadaan Tanah Proyek Milik Pemerintah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah disertasi yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut disertakan dalam administrasi untuk ujian **TERTUTUP**.

Banjarmasin, 31 Oktober 2025

Direktur,



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME
1489/Un.14/IV/UPM-BP/1/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com>, dengan ini, kami nyatakan bahwa disertasi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Rizki Azhari
NIM : 210311020088
Jenjang/Program Studi : S-3 Ilmu Syaria'ah (IS)
Judul : Rekonstruksi Hukum Tentang Ganti Rugi Sisa Pengadaan Tanah Proyek Milik Pemerintah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil 7% (kurang dari 20%). Naskah disertasi yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut disertakan dalam administrasi untuk ujian **TERBUKA**.

Banjarmasin, 15 Desember 2026

Wakil Direktur Pascasarjana

Dr. Wahyudin, M.Pd.I.



Halaman Persetujuan
PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA PROGRAM DOKTOR

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

MUHAMMAD RIZKI AZHARI

NIM. 210311020088

**Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Untuk
Dapat Diajukan Kepada Dewan Penguji**

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, M.A

Tanggal 9 Januari 2026

Pembimbing II



Dr. Muhsimin, S.Ag., M.A

Tanggal 9 Januari 2026

PENGESAHAN DISERTASI

Disertasi yang berjudul **“Rekonstruksi Hukum Tentang Ganti Rugi Sisa Pengadaan Tanah Proyek Milik Pemerintah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional”** ditulis oleh Muhammad Rizki Azhari NIM. 210311020088 telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin:

Hari : Jum'at

Tanggal : 30 Januari 2026

Direktur Pascasarjana
UIN Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A.

NIP. 197112091996031001

Tim Penguji

- | Nama | Tanda Tangan |
|--|--------------|
| 1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA
(Ketua/Penguji) | 1. |
| 2. Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
(Penguji Utama) | 2. |
| 3. Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, M.A
(Penguji) | 3. |
| 4. Dr. Robensjah Sjachran, S.H., M.H
(Penguji Eksternal) | 4. |
| 5. Dr. Muhaimin, S.Ag., M.A
(Penguji) | 5. |
| 6. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA
(Penguji) | 6. |
| 7. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk
(Penguji/Sekretaris) | 7. |

ABSTRAK

Muhammad Rizki Azhari. NIM.210311020088. Rekonstruksi Hukum Tentang Ganti Rugi Sisa Pengadaan Tanah Proyek Milik Pemerintah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional. Pembimbing Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, M.A dan Pembimbing Dr. Muhaimin, S.Ag., M.A, pada Program Studi Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. 2026.

Kata Kunci: Rekonstruksi Hukum, Ganti Rugi, Tanah Sisa, Hukum Islam, Ihya al-Mawat, Kepastian Hukum.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problematika yuridis terkait ketidakpastian mekanisme dan batasan waktu pemberian kompensasi atas tanah sisa dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dinilai masih menyisakan celah regulasi (*rechtsvacuum*) yang berpotensi merugikan hak perdata pemilik lahan, terutama ketika sebagian tanah yang tidak terambil proyek menjadi terisolasi, sempit, atau tidak lagi memiliki nilai guna ekonomi. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis kelemahan regulasi ganti rugi tanah sisa dalam hukum nasional, meninjau permasalahan tersebut dari perspektif hukum Islam, serta merumuskan rekonstruksi hukum yang berbasis pada nilai keadilan substantif dan kemaslahatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat preskriptif yang berorientasi pada perumusan norma hukum ideal. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif hukum Islam melalui prinsip *la darar wa la dirar* dan transformasi konsep *Ihya al-Mawat*. Dalam penelitian ini, *Ihya al-Mawat* direkonstruksi bukan sekadar sebagai tindakan fisik menghidupkan lahan, melainkan sebagai kewajiban negara (*waliyy al-amr*) untuk memulihkan fungsi sosial-ekonomi harta warga negara yang "mati" akibat dampak pembangunan. Negara memikul kewajiban syar'i untuk memastikan tanah sisa tidak menjadi aset yang terbengkalai melalui pemberian kompensasi (*ta'widh*) yang adil dan responsif. Hasil penelitian menunjukkan perlunya rekonstruksi hukum pada Pasal 25 dan Pasal 35 UU No. 2 Tahun 2012 untuk mempertegas kewajiban negara dalam memberikan ganti rugi secara otomatis, transparan, dan memiliki batasan waktu yang jelas. Rekonstruksi ini mencakup penambahan norma mengenai definisi teknis tanah sisa, prosedur sosialisasi yang berkelanjutan, hingga kepastian jangka waktu pembayaran ganti kerugian. Temuan utama penelitian menegaskan bahwa transformasi konsep *ihya al-mawat* dapat dijadikan landasan konseptual bagi pembentukan hukum positif yang berorientasi pada keadilan distributif. Hal ini diharapkan mampu mencegah kematian ekonomi atas harta masyarakat sekaligus mewujudkan kemaslahatan dalam tata kelola agraria nasional yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

ABSTRACT:

Muhammad Rizki Azhari. NIM. 210311020088. Reconstruction of the Law on Compensation for the Remaining Land Acquisition of Government-Owned Projects in the Perspective of Islamic Law and National Law. Supervisors: Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, M.A., and Dr. Muhaimin, S.Ag., M.A. Sharia Science Study Program, Postgraduate Program, UIN Antasari Banjarmasin. 2026.

Keywords: Legal Reconstruction, Compensation, Residual Land, Islamic Law, Ihya al-Mawat, Legal Certainty.

This research is motivated by legal issues related to the uncertainty of the mechanisms and time limits for granting compensation for residual land in land acquisition for public purposes in Indonesia. The provisions of Law Number 2 of 2012 are considered to still leave regulatory gaps (*rechtsvacuum*) that have the potential to harm the civil rights of land owners, particularly when land not acquired by a project becomes isolated, narrow, or no longer has economic value. The primary objective of this research is to analyze the weaknesses of the regulation on compensation for residual land in national law, examine these issues from an Islamic legal perspective, and formulate a legal reconstruction based on the values of substantive justice and public welfare. The research method used is normative juridical, with a prescriptive nature oriented toward the formulation of ideal legal norms. The analysis is conducted by integrating Islamic legal perspectives through the principle of *la darar wa la dirar* and a transformation of the concept of *Ihya al-Mawat*. In this study, *Ihya al-Mawat* is reconstructed not merely as a physical act of revitalizing land, but as a state obligation (*waliyy al-amr*) to restore the socio-economic function of citizens' assets that have "died" due to the impact of development. The state bears a sharia obligation to ensure that remaining land does not become abandoned assets through the provision of fair and responsive compensation (*ta'widh*). The results of the study indicate the need for legal reconstruction of Articles 25 and 35 of Law No. 2 of 2012 to emphasize the state's obligation to provide compensation automatically, transparently, and with a clear time limit. This reconstruction includes the addition of norms regarding the technical definition of remaining land, ongoing socialization procedures, and certainty about the compensation payment period. The study's main findings confirm that the transformation of the concept of *Ihya al-Mawat* can serve as a conceptual foundation for the formation of positive law oriented towards distributive justice. This is expected to prevent the economic demise of community assets while realizing the welfare of the people in a more humane and equitable national agrarian governance.

خلاصة

محمد رزقي أزهرى. رقم القيد: ٢١٠٣١١٠٢٠٠٨٨. إعادة بناء القانون المتعلق بالتعويض عن الأراضي المتبقية في مشاريع نزع الملكية الحكومية من منظور القانون الإسلامي والقانون الوطني. المشرف الأول: الأستاذ الدكتور الحاج أحمد فوزي عسيري، الماجستير. والمشرف الثاني: الدكتور مؤمن، الليسانس، الماجستير. برنامج دراسات الشريعة، كلية الدراسات العليا بجامعة أنطاساري الإسلامية الحكومية بنجر ماسين. ٢٠٢٦م.

الكلمات المفتاحية: إعادة بناء القانون، التعويض، الأراضي المتبقية، القانون الإسلامي، إحياء الموات، اليقين القانوني.

ينطلق هذا البحث من دوافع قانونية تتعلق بعدم وضوح آلية ومدة التعويض عن الأراضي المتبقية في عمليات الاستملاك للأراضي للمصلحة العامة في إندونيسيا. ويُعتقد أن أحكام القانون رقم 2 لسنة 2012 لا تزال تنطوي على ثغرات تنظيمية قد تُلحق الضرر بالحقوق المدنية لمالكي الأراضي، لا سيما عندما تصبح بعض الأراضي غير المستملكة معزولة أو ضيقة أو تفقد قيمتها الاقتصادية. ويهدف هذا البحث بشكل أساسي إلى تحليل مواطن الضعف في تنظيم التعويض عن الأراضي المتبقية في القانون الوطني، ومراجعة هذه المشكلات من منظور قانوني إسلامي، وصياغة إعادة بناء قانونية تستند إلى قيم العدالة الموضوعية والمصلحة العامة. ويعتمد البحث على منهج قانوني معياري ذي طبيعة توجيهية، موجه نحو صياغة معايير قانونية مثالية. ويتم التحليل من خلال دمج منظور الشريعة الإسلامية عبر مبدأ "لا ضرر ولا ضرر" وتفسير مفهوم "إحياء المواقيت". في هذا البحث، يُعاد تعريف مفهوم إحياء المواقيت ليس فقط كعملية مادية لإحياء الأرض، بل كالتزام من الدولة باستعادة الوظيفة الاجتماعية والاقتصادية لأصول المواطنين التي تضررت بفعل التنمية. وتلتزم الدولة، وفقاً للشريعة الإسلامية، بضمان عدم تحول الأراضي المتبقية إلى أصول مهجورة من خلال توفير تعويض عادل ومناسب. وتشير نتائج الدراسة إلى ضرورة إعادة صياغة المادتين 25 و35 من القانون رقم 2 لسنة 2012، للتأكيد على التزام الدولة بتقديم التعويض تلقائياً وشفافاً وفي إطار زمني واضح. وتشمل هذه الصياغة إضافة معايير تتعلق بالتعريف الفني للأراضي المتبقية، وإجراءات إعادة التأهيل الاجتماعي المستمرة، وتحديد فترة سداد التعويض. وتؤكد النتائج الرئيسية للدراسة أن تحويل مفهوم إحياء المواقيت يمكن أن يشكل أساساً مفاهيمياً لصياغة قانون وضعي موجه نحو العدالة التوزيعية. ومن المتوقع أن يمنع هذا التدهور الاقتصادي لأصول المجتمع مع تحقيق الفوائد في إدارة زراعية وطنية أكثر إنسانية وإنصافاً.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kemudahan yang telah diberikan, doa-doa yang terkabulkan, dan kasih sayang-Nya yang tiada pernah berhenti. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW., Nabi terakhir yang tidak ada Nabi sesudah beliau, model terbaik dan yang paling ideal untuk dijadikan panutan dan tuntunan.

Disertasi yang berjudul: **“Rekonstruksi Hukum Tentang Ganti Rugi Sisa Pengadaan Tanah Proyek Milik Pemerintah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional”**, mengkaji upaya pencapaian kepastian hukum dan keadilan substantif melalui formulasi rekonstruksi terhadap ketentuan mengenai jangka waktu dan mekanisme pemberian ganti kerugian bagi pemilik tanah sisa pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Dalam penyusunan Disertasi ini, Peneliti mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Peneliti menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kesempatan dan dukungan yang diberikan kepada kami. Disertasi ini disusun untuk mewujudkan ide dan konsep yang peneliti yakini memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi positif bagi pengembangan hukum, khususnya dalam ruang lingkup objek penelitian. Maka dari itu ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada:

- 1) Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd, selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin;

- 2) Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A, selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin;
- 3) Bapak Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, M.A dan Bapak Dr. Muhaimin, S.Ag., M.A selaku pembimbing yang selalu memberikan perhatian, bimbingan, dorongan, dan semangat untuk segera menyelesaikan disertasi ini;
- 4) Ibu Dr. Hj. Gusti Muzainah, M.H, selaku Ketua Prodi S3 Ilmu Syariah yang dengan seksama memberikan arahan yang sangat bermanfaat
- 5) Bapak Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A., selaku Sekretaris Prodi S3 Ilmu Syariah yang telah memberikan masukan dan arahan untuk penyelesaian disertasi ini.
- 6) Seluruh dosen Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
- 7) Seluruh staf Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
- 8) Seluruh teman-teman mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan khususnya mahasiswa Program Studi Ilmu Syariah angkatan 2021 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada penulis.
- 9) Ayahanda H. Tajuddin Noor, S.Sos (almarhum) dan ibunda Hj. Syamsiariani yang telah memberikan dasar-dasar utama yang sangat penting dalam pembentukan karakter pada penulis serta motivasi yang kuat dari Mertua Bapak Ir. H. Izzuddin Noor, MS dan Ibu Drs. Hj. Nurul Aini, M.Pd

(almarhumah) teriring doa kepada mereka. “Robbighfirlii waliwaalidaiya warhamhumaa kamaa robbayaanii shoghiiroo” (Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan kasihanilah keduanya/beliau sebagaimana mereka mengasihiku sejak aku kecil).

- 10) Teristimewa dan lebih khusus kepada yang penulis cintai istri tersayang Haniyyah, S.ST, dan anak-anak penulis yang terkasih Aqueena Davina Mumtazah (9 tahun) dan Muhammad Kafi Alfarizi (4 tahun) dengan karakter dan keceriaan, kelucuan khasnya masing-masing mendorong penulis secepatnya menyelesaikan penyusunan disertasi ini. Yang paling penting dan berharga melalui keluarga inilah penulis terus belajar dan mendapat pelajaran khususnya pemaknaan kekuatan kata syukur, sabar dan ikhlas.
- 11) Saudara-saudara penulis Kanda Muhammad Eddhy Saputra, A.Md., Muhammad Herry Hernadhi, S.Pd., Muhammad Taufik Hidayat, S.Kom., Muhammad Iqbal Sanjaya, S.HI, M.SI., Adinda Muhammad Rizaldi Khatami, S.H., Shufia Rahmi., Muhammad Shufi Rahman., penulis betul-betul menghaturkan terima kasih, atas dorongan/dukungan yang tiada henti serta doanya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan studi S3 program Doktor Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
- 12) Seluruh Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru yang tidak bisa namanya penulis sebutkan dari tahun 2011 sampai sekarang yang telah memberikan kesempatan dalam bekerja dan kuliah untuk terus belajar sejak pendidikan S1 sampai dengan Pendidikan S3.

13) Seluruh rekan-rekan kerja pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru khususnya Seksi Survei dan Pemetaan yang telah memberikan pengalaman dalam bekerja sama, baik suka maupun duka yang datang dan pergi silih berganti sehingga tetap menjaga silaturahmi hingga sampai sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan disertasi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik, saran dan himbauan yang konstruktif sangat penulis harapkan untuk perbaikan. Akhirnya penulis berharap semoga disertasi ini dapat diterima dan bermanfaat bagi penulis, universitas, dan pembaca sekalian.

Banjarmasin, 5 Januari 2026

Penulis,

Muhammad Rizki Azhari
NIM. 210311020088

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam disertasi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Lain	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	s'a'	s\	Es (dengan titik di atas)
خ	Jim	J	Je
ح	h}a'	h}	Ha (dengan titik di bawah)
ج	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z'al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متكبر	Ditulis	Mutakabbir
القدوس	Ditulis	al-Quddu>s

III. Ta'marbutah Di Akhir Kata

a. Bila dimatikan h

جامعة	Ditulis	jami'ah
مكتبة	Ditulis	Maktabah

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta kedua terpisah, maka ditulis dengan h

	Ditulis	al-maktabah al-jami>lah
--	---------	-------------------------

IV. Vokal Pendek

(َ)	Fathah	Ditulis	A
(ِ)	Kasrah	Ditulis	I
(ُ)	Dammah	Ditulis	U
شكر	Fathah	Ditulis	Syakara
قرأ	Kasrah	Ditulis	quri’a
ينتق	Dammah	Ditulis	yant}iqu

V. Vokal Panjang

1	Fathah + Alif ك م ل ة	Ditulis	a> ka>milah
2	Fathah + ya mati صلى	Ditulis	a> s}alla>
3	Kasrah + ya mati شديد	Ditulis	i> syadi>d
4	Dammah + wawu mati صدر	Ditulis	u> s}udu>r

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati رويد	Ditulis	ai ruwaidun
2	Fathah + wawu mati وفر عون ذي الوتاد	Ditulis	au wa fir'auna z\i al-auta>d

VII. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Postrof

أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا	Ditulis	a'antum asyaddu khalqan
--------------------------	---------	-------------------------

VIII. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القران	Ditulis	al-Qur'a>n
الكتاب	Ditulis	al-kita>b

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan diidgamkan

الصبح	Ditulis	as } -s } ubh } u
الساهرة	Ditulis	as-sa>hirah

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisanya

بر الوالدين	Ditulis	birru al-wa>lidaini
إذا الشمس	Ditulis	Iz\ a asy-syamsu

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN DISERTASI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	1
KATA PENGANTAR	4
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	8
DAFTAR ISI.....	12
DAFTAR TABEL.....	15
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Definisi Operasional.....	Error! Bookmark not defined.
1. Ketentuan umum mengenai pengadaan tanah..	Error! Bookmark not defined.
2. Bentuk Ganti Kerugian	Error! Bookmark not defined.
3. Pengertian Kepentingan Umum	Error! Bookmark not defined.
4. Pengertian sisa tanah.....	Error! Bookmark not defined.
5. Pengertian Masalah	Error! Bookmark not defined.
6. Pengertian Rekonstruksi.....	Error! Bookmark not defined.
E. Penelitian Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
F. Kajian Teori.....	Error! Bookmark not defined.
1. Teori Keadilan & Teori Maqasid Syariah sebagai Grand Theory	Error! Bookmark not defined.
2. Teori Good Governance & Teori Administrasi sebagai Middle Theory	Error! Bookmark not defined.
3. Teori Mati Tanah & Teori Hidup Tanah Sebagai Applied Theory	Error! Bookmark not defined.
G. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1. Jenis Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
2. Pendekatan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3. Sifat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4. Sumber Data.....	Error! Bookmark not defined.
a. Data Primer	Error! Bookmark not defined.
b. Data Sekunder.....	Error! Bookmark not defined.

6. Metode Analisis Data.....**Error! Bookmark not defined.**

H. Sistematika Penulisan**Error! Bookmark not defined.**

BAB II KEBIJAKAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA TERKAIT TANAH SISA PENGADAAN TANAH PROYEK MILIK PEMERINTAHError! Bookmark not defined.****

A. Kebijakan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Untuk Kepentingan Umum .Error! Bookmark not defined.****

1. Definisi , Asas, dan Tujuan Pengadaan Tanah Dalam Hukum Islam
Error! Bookmark not defined.
2. Konsep Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Menurut Peraturan Hukum Nasional**Error! Bookmark not defined.**
3. Landasan Hukum Ganti Rugi Pengadaan Tanah di Indonesia..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Prosedur Ganti Kerugian sesuai dengan Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang.....Error! Bookmark not defined.****

1. Prosedur Penilaian dan Penetapan Ganti Kerugian.....**Error! Bookmark not defined.**
2. Bentuk Pemberian Ganti Kerugian**Error! Bookmark not defined.**
3. Prosedur Pemberian Ganti Kerugian.....**Error! Bookmark not defined.**

C. Kebijakan Yang di Tempuh Pejabat di Lapangan .Error! Bookmark not defined.****

1. Konsep Dasar Sisa Tanah Kategori Sisa Tanah... **Error! Bookmark not defined.**
2. Praktik Pemberian Ganti Rugi**Error! Bookmark not defined.**
3. Analisis Yuridis Praktik Pemberian Ganti Rugi .. **Error! Bookmark not defined.**
4. Kebijakan Penyelesaian Pemberian Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah untuk Proyek Pemerintah di Indonesia **Error! Bookmark not defined.**

BAB III PENYELESAIAN KASUS TANAH SISA PENGADAAN TANAH PROYEK MILIK PEMERINTAH DI INDONESIA DAN BEBERAPA NEGARA MUSLIMError! Bookmark not defined.****

A. Penyelesaian Kasus Tanah Sisa Proyek Pemerintah di IndonesiaError! Bookmark not defined.****

B. Penyelesaian Kasus Tanah Sisa Proyek Pemerintah di Beberapa Negara MuslimError! Bookmark not defined.****

BAB IV REKONSTRUKSI PASAL 25 DAN 35 UNDANG-UNDANG_No. 2 TAHUN 2012 UNTUK PENYELESAIAN KASUS TANAH SISA

PENGADAAN TANAH PROYEK MILIK PEMERINTAHError! Bookmark not defined.

A. Petunjuk Penyelesaian Kasus Menurut Perspektif Hukum Islam.....Error! Bookmark not defined.

1. Prinsip-prinsip Hukum Islam terkait pengadaan tanah Error! Bookmark not defined.
2. Hak Milik dan Kepemilikan Dalam Pengadaan Tanah Menurut Hukum Islam.....Error! Bookmark not defined.
3. Pemanfaatan Untuk Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Menurut Hukum Islam.....Error! Bookmark not defined.
4. Pengalihan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Hukum Islam.....Error! Bookmark not defined.
5. Konsep Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Siyasah Syari'ah.....Error! Bookmark not defined.
6. Konsep Musyawarah Dalam Pengadaan Tanah Menurut Hukum Islam Error! Bookmark not defined.

B. Petunjuk Penyelesaian Kasus Menurut Perspektif Hukum Nasional Error! Bookmark not defined.

C. Rekonstruksi Pasal 25 Undang-Undang No 2 Tahun 2012.....Error! Bookmark not defined.

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 25Error! Bookmark not defined.
2. Tinjauan Hukum Nasional terhadap Pasal 25 Error! Bookmark not defined.
3. Persamaan Pandangan antara Hukum Islam dan Hukum NasionalError! Bookmark not defined.
4. Tabel Perbandingan Rekonstruksi Pasal 25 ...Error! Bookmark not defined.
5. Implikasi Rekonstruksi Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Nasional Error! Bookmark not defined.

D. Rekonstruksi Pasal 35 Undang-Undang No 2 Tahun 2012.....Error! Bookmark not defined.

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 35Error! Bookmark not defined.
2. Tinjauan Hukum Nasional terhadap Pasal 35 Error! Bookmark not defined.
3. Persamaan Pandangan antara Hukum Islam dan Hukum NasionalError! Bookmark not defined.
4. Tabel Perbandingan Rekonstruksi Pasal 35 ...Error! Bookmark not defined.
5. Implikasi Rekonstruksi Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Nasional Error! Bookmark not defined.

BAB V PENUTUP.....Error! Bookmark not defined.

A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Rekomendasi.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
Peraturan Perundang-undangan	Error! Bookmark not defined.
Internet	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Daftar Nominatif Desa Kebak, Kecamatan Kebakkramat, Kab. Karanganyar.	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 2 Rekapitulasi Bidang Tanah Sisa	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 3 Rekapitulasi Kriteria Tanah Sisa Jenis Penggunaan Tanah Pertanian	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 4 Rekapitulasi Kriteria Tanah Sisa Jenis Penggunaan Tanah Permukiman	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 5 Rekapitulasi Penyelesaian Tanah Sisa Luas Lebih dari 100 m2...	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 6 Daftar Bidang Tanah Sisa	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 1 Perbandingan antara hukum Islam dan hukum Nasional.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 2 Rekonstruksi Pasal 25 Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2012	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 3 Perbandingan antara hukum Islam dan hukum Nasional.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 4 Rekonstruksi Pasal 35 Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2012	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Network Visualization.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 1. 2 Overlay Visualization.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 1. 3 Density Visualization	Error! Bookmark not defined.
Gambar 1. 4 Bagan Kerangka Konseptual Teoritik Penelitian	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 1 Mekanisme I	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 2 Mekanisme II	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 3 Mekanisme III	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 4 Mekanisme IV	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 1 Hasil Peta Rincian Kegiatan Pengadaan Tanah.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 2 Hukum Domain Utama dan Pengambilalihan Properti Sementara	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengambilalihan Hak Milik atas Tanah dan Bangunan untuk Kepentingan Umum.	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 4 Undang-Undang Pengadaan Tanah 1960 Negara Malaysia.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 5 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Iran...	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 6 Resolusi No. (6) Tahun 2022 Emirat Dubai....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 7 Undang-Undang Nomor (2) Tahun 2022 Emirat Dubai	Error! Bookmark not defined.